

**PENERAPAN *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung)**



**Asri Andini
NPM. 1451020018
Jurusan : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PENERAPAN *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Asri Andini

NPM. 1451020018

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I

Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak.,Akt

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh bank kepada nasabah, yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Bandar Lampung. Penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Bandar Lampung disebabkan oleh berbagai faktor seperti, kegagalan usahadebitur atau nasabah tidak ada itikad baik untuk mengangsur pembiayaan yang diperoleh setelah jatuh tempo. Usaha bank untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah salah satunya adalah dengan melakukan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran agar pembiayaan yang diberikan dapat ditarik kembali.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Bandar Lampung, dan bagaimana penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung, untuk mengetahui kesesuaian *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dengan perspektif ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebagai proses penelitian yang menghasilkan kualitatif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau pelaku yang diamati, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah. Penerapan *rescheduling* dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280, dan fatwa DSN No. 48/ DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum apabila nasabah dalam keadaan tidak ada itikad baik. Berdasarkan hal ini BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal
Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* (Studi
Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Asri Andini**

NPM : **1451020018**

Program Studi : **Perbankan Syari'ah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juni 2018

Pembimbing I

Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I

NIP. 197707252002121001

Pembimbing II

Suhendar, S.E., M.S.Ak.,Akt

Mengetahui

Ketua Jurusan

Ahmad Habibi, S.E., M.E

NIP. 197905142003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah*”** (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung) disusun oleh **Asri Andini, NPM : 1451020018 Jurusan Perbankan Syari’ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 31 Juli 2018.

TIM PENGUJI

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Ketua | : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I | (.....) |
| Sekretaris | : Liya Ermawati, M.Ak | (.....) |
| Penguji 1 | : Drs. H. Nasrudin, M.Ag | (.....) |
| Penguji 2 | : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

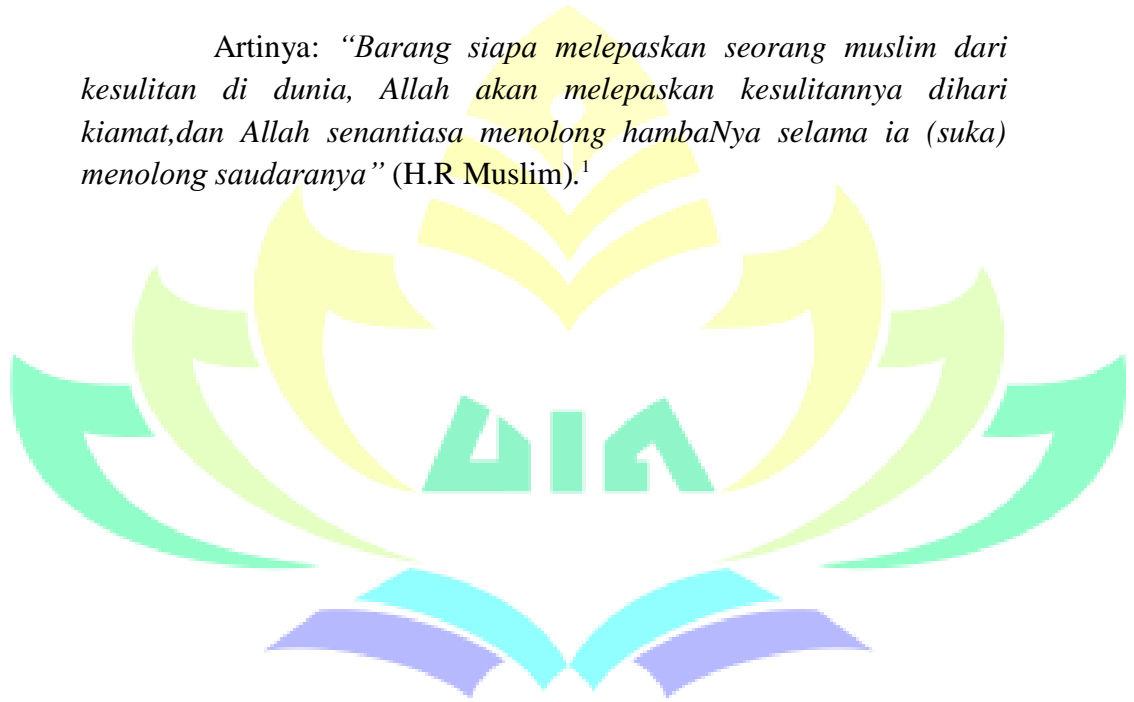

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

NIP. 195808241989031003

MOTTO

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ عَبْدٍ مَا دَمَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat,dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya” (H.R Muslim).¹



¹Syaikh M. Nashiruddin al-Albani *Mukhtasar Shahih Muslim*, h. 869.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT atas rencananya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika berusaha dan selalu percaya pada-Nya. Shalawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat Beliau selalu menyertai penulis Dunia dan Akhirat aamiin.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak H. Hadi Muryono dan Ibu Hj. Surtini penulis menghaturkan terima kasih banyak atas seluruh kasih sayang, perhatian, do'a dan dukungannya kepada penulis.
2. Kakakku Gunazar Gesang dan Adikku Bagus Tri Anggoro yang selalu mendukung dan memotivasi.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu agar kelak kedepannya mampu berfikir lebih maju.
4. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya PS D.
5. Teman-teman KKN Kelompok 187.
6. Sahabat-sahabat terbaikku (Alitya, Desy Nurlaila, Eka Handayani, Engga Dwi, Excalen Putri, Fitri Indriyanti, Firda Eliani, Jaka Santosa, Maya Rosita, Meita Sari, Lia Anjar, Regi Dinita, dan Rivan Zainuri) yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepadaku sampai menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Asri Andini, lahir di Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Pada Tanggal 06 November 1996, sebagai anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak H. Hadi Muryono dan Ibu Hj. Surtini.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. SD Negeri 1 Sekincau Pada tahun 2003 - 2008.
2. MTs Nurul Iman Sekincau Pada tahun 2008 - 2011.
3. MAN 1 Bandar Lampung Pada tahun 2011- 2014.
4. Pada tahun yang 2014 penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan mengambil program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan nikmat yang tiada pernah dapat di dustakan dan atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Murobbi dan teladan sejati Rasulullah Muhammad SAW yang mampu membimbing manusia dari jalan sesat menuju jalan yang diridhai Allah.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E.,M.Si selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang

membimbing kami selama proses akademik berlangsung sehingga kami bisa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.

3. Bapak Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I (Pembimbing I), dan Bapak Suhendar, S.E.,M.S.,Ak.,Akt. (pembimbing II) selaku pembimbing skripsi penulis yang meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama perkuliahan.
5. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Kepada Bapak Ridwansyah selaku Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, Bapak Dephi Wibowo selaku Kepala Bagian Pemasaran, beserta karyawan yang telah memberikan izin dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 20 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGSAHAN..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| D. Rumusan Masalah | 10 |
| E. Batasan Masalah..... | 10 |
| F. Tujuan & Manfaat Penelitian | 11 |
| G. Tinjauan Pustaka | 12 |
| H. Metode Penelitian..... | 15 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | |
| 1. Pengertian BPRS | 21 |
| 2. Tujuan BPRS..... | 23 |
| B. Pembiayaan | |
| 1. Pengertian Pembiayaan | 23 |
| 2. Jenis-Jenis Pembiayaan | 25 |
| 3. Unsur-Unsur Pembiayaan | 25 |
| 4. Fungsi Pembiayaan | 31 |
| 5. Analisis Pembiayaan | 32 |
| 6. Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan | 37 |

| | |
|--|----|
| 7. Kualitas Pembiayaan | 40 |
| C. Pembiayaan <i>Murabahah</i> | |
| 1. Pengertian <i>Murabahah</i> | 42 |
| 2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> | 44 |
| 3. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 45 |
| 4. Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 47 |
| D. Risiko Pembiayaan Bermasalah | 47 |
| E. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah | 49 |
| F. Landasan Fatwa DSN tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah | 57 |

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum BPRS Bandar Lampung | |
| 1. Sejarah BPRS Bandar Lampung | 59 |
| 2. Identitas Perusahaan | 63 |
| 3. Visi dan Misi dan Motto BPRS Bandar Lampung | 64 |
| 4. Susunan Pengurus BPRS Bandar Lampung | 64 |
| 5. Perizinan BPRS Bandar Lampung | 65 |
| 6. Kegiatan Usaha BPRS Bandar Lampung | 65 |
| 7. Perkembangan Usaha BPRS Bandar Lampung | 66 |
| 8. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung | 66 |
| 9. Produk-produk BPRS Bandar Lampung | 69 |
| B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Bandar Lampung | 71 |
| C. Faktor Penyebab Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Bandar Lampung | 73 |
| D. Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Bandar Lampung | 74 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Mekanisme <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Bandar Lampung | 77 |
| B. Penerapan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> di BPRS Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam | 86 |

BAB V PENUTUP

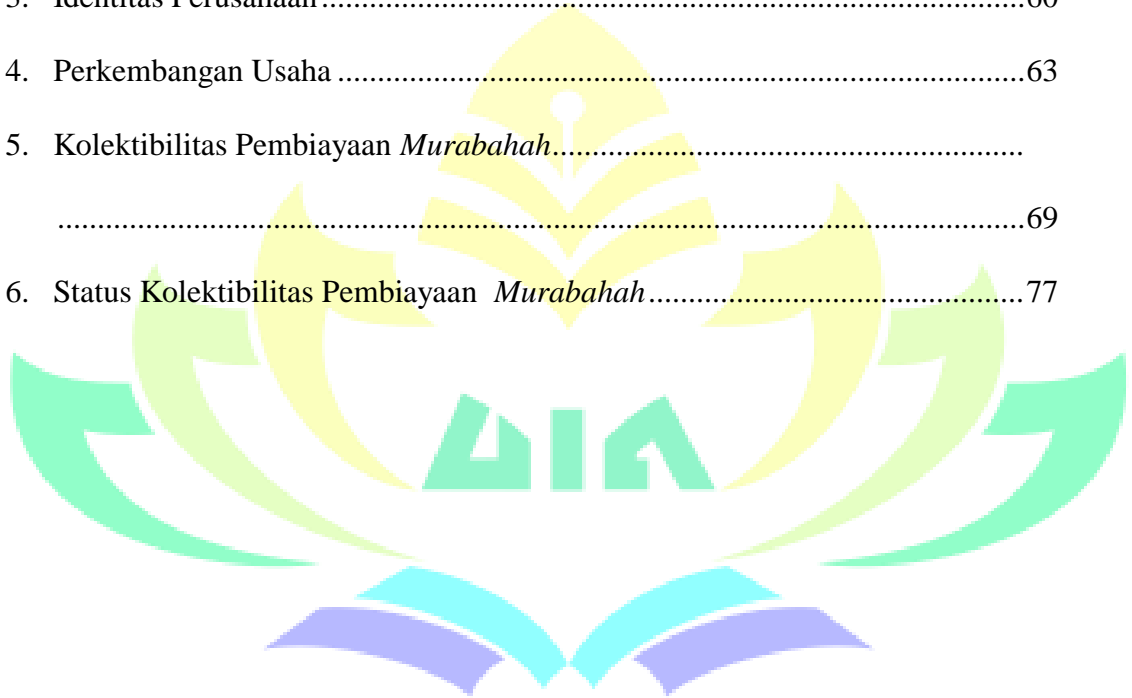
| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran | 99 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada BPRS Bandar Lampung | 8 |
| 2. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| 3. Identitas Perusahaan | 60 |
| 4. Perkembangan Usaha | 63 |
| 5. Kolektibilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 69 |
| 6. Status Kolektibilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 77 |



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung65
2. Proses Pengajuan *Rescheduling*79



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Skripsi
2. Surat Keterangan Izin Pra Riset
3. Surat Keterangan Riset
4. Panduan Wawancara
5. Surat Keterangan Pembimbing



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini perlu penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. **“PENERAPAN *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD *MURABAHAH*.”**

A. Penegasan Judul

Penerapan adalah perbuatan menerapkan,²yaitu suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah,³ yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.⁴

²Petter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta : Modern English Press 2002), h. 1598.

³Wangsanwidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 448.

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.98.

Pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*margin*) atau bagi hasil.⁵

Modal Kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian barang baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.⁶

Pembiayaan Bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.⁷

Murabahah adalah produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli⁸, dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga

⁵Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Safitria Insania Press, 2009), h. 85

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 231.

⁷Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. I, No. 1, Juni 2016, h. 102

⁸Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), h. 122.

beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.⁹ *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁰

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Mengingat banyak pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Bandar Lampung, dan masalah penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* ini sesuatu hal yang belum dibicarakan oleh masyarakat luas, oleh karena itu akan dilakukan penelitian judul skripsi ini dan judul ini menarik untuk diteliti sebagai penambah wawasan peneliti atau pembaca.

2. Secara Subjektif

- a. Judul tersebut menarik untuk diteliti, terlebih judul tersebut berkaitan dengan jurusan penulis yaitu prodi perbankan syariah
- b. Ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul penelitian ini baik data primer maupun data sekunder memiliki kemudahan akses dan letak penelitian yang mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan

⁹*Ibid*, h. 98.

¹⁰*Ibid*, h. 113.

dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.¹¹ Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹²

Pembagian bank menurut jenisnya, sebagaimana dikemukakan di atas, dimaksudkan sebagai sarana untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan usaha perbankan saat ini terutama dalam menghadapi era globalisasi perekonomian yang lebih mengarah kepada generalisasi usaha perbankan.¹³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank dengan sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip *muamalah*. Usaha bank perkreditan

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2011), h. 32

¹²*Ibid*, h. 33.

¹³Suhrawadi, Lubis, Farid, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika : 2014), h. 71.

rakyat termasuk BPRS meliputi penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.¹⁴ Kehadiran BPRS diharapkan mampu mesejahterkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya umat muslim melalui fasilitas pembiayaan atau permodalan untuk mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah.

Pembiayaan (*financing*) merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana (*Shahibul mal*) kepada pengguna dana (*mudharib*).¹⁵

Dalam menyalurkan produk pembiayaan berdasarkan penggunaannya, BPRS BPRS Bandar Lampung memberikan layanan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Produk pembiayaan modal kerja merupakan produk yang paling banyak dimanfaatkan nasabah. Bank dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya melalui fasilitas pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional

¹⁴ *Ibid*, h. 72.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2011), h. 105.

perusahaan,¹⁶ sedangkan dalam bank syariah pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁷ Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.¹⁸

Ayat diatas menjelaskan dengan tegas bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian untuk kerja sama dalam hal ini pembiayaan modal kerja, setelah akad tersebut disepakati kedua pihak dalam hal ini nasabah dan bank harus menaati dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama.

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank syariah dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad *murabahah*. Pembiayaan akad *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari

¹⁶*Ibid*, h.185.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 234.

¹⁸Al-Qur'an Terjemahan. (Q.S Al-Ma'idah : 1)

pemasok ditambah keuntungan.¹⁹ *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁰

Namun, dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.²¹

BPRS Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah. Tabel 1.1 menunjukkan kondisi pembiayaan bermasalah pada BPRS Bandar Lampung periode tahun 2015-2017.

¹⁹*Op.Cit*, h. 98.

²⁰*Ibid*, h. 113.

²¹Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. I, No. 1, Juni 2016, h. 102

Tabel 1.1
Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Bandar Lampung
Periode 2015 – 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Tahun | Jumlah Pembiayaan | Pembiayaan Bermasalah |
|--------------|--------------------------|------------------------------|
| 2015 | 47.052.279.908 | 315.503.714 |
| 2016 | 51.140.286.301 | 959.582.730 |
| 2017 | 56.989.896.463 | 624.267.839 |
| Jumlah | 122.700.705.563 | 1.899.354.283 |

Sumber : BPRS Bandar Lampung 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung yang mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir . Ini merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BPRS Bandar Lampung yaitu risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah. Pada tahun 2017 total asset BPRS Bandar Lampung mencapai Rp 73.854.569,- dengan jumlah 1182nasabah, dan jumlah rasio pembiayaan bermasalah sebesar Rp 624.267.839,- Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah bangkrut, atau adanya itikad tidak baik dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur..

Penyelamatan pembiayaan bermasalah secara dini merupakan keharusan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank. Bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang

dijadikan acuan dan pedoman oleh karyawan bagian pembiayaan dan pengawasan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.²²

Rescheduling di BPRS Bandar Lampung merupakan salah satu dari beberapa metode yang dilakukan untuk menyelesaikan ataupun mengatasi pembiayaan bermasalah. *Rescheduling* berarti bank memberikan keringanan kepada nasabah dalam mengangsur kewajibannya kepada bank. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam kesusahan maka kewajiban orang yang memberi utang untuk menunggu sampai ia mampu membayar kembali. Firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah : 280)

Ayat di atas menjelaskan bahwa “Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, hendaknya yang memberi hutang memberi waktu penangguhan sampai dia lapang. Dalam melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah terlebih dahulu bank melihat alasan mengapa nasabah melakukan pelanggaran. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat memilih langkah yang

²²Nur Eka Prasetyana, dkk, “Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 4, Oktober 2014.

tepat sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank dapat kembali lagi.

Pelaksanaan *rescheduling* inilah yang menarik perhatian penyusun sehingga menurut penyusun perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* (Studi Kasus Pada BPRS Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebelumnya rumusan masalah yang akan dibahas peneliti adalah :

1. Bagaimana Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang adayaitu tentang penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*. Masalah pada penelitian ini dibatasi pada :

1. Penelitian akan berfokus pada bagaimana mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS

Bandar Lampung dan bagaimana mekanisme *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah pihak BPRS Bandar Lampung, Khususnya direktur utama dan kepala bagian pemasaran BPRS Bandar Lampung untuk menggali informasi awal terkait pelaksanaan *rescheduling* tersebut.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabaha* dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pembaca tentang kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah.

- c. Sebagai informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai lembaga keuangan syariah sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk penelaah yang lebih komprehensif, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian.

Beberapa referensi yang telah ada dan berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat adalah :

Tabel. 1.2

Penelitian Terdahulu

| No | Tahun | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil/Temuan | Variabel yang Terkait |
|----|-------|----------------|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2011 | Reza Yudistira | Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri | Memberikan hasil/gambaran dan penjelasan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui tahap <i>rescheduling</i> , <i>restruktur</i> ing, eksekusi benda jaminan, ²³ dan melalui jalur hukum | • Penerapan <i>Rescheduling</i> |

²³Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri". Skripsi, Program studi Muamalah (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h 76.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | apabila nasabah dalam keadaan tidak ada itikad baik. | |
| Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira pada tahun 2011. Meneliti mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara menyeluruh dan tidak menganalisis secara perspektif ekonomi Islam, dan data wawancara didapat dari Manager, dan Staff bagian pembiayaan. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan <i>rescheduling</i> pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad <i>murabahah</i> secara khusus dan menghubungkannya dengan perspektif ekonomi Islam, dengan data wawancara diperoleh dari Direktur Utamadan Kepala bagian pemasaran. | | | | | |

Sumber : Hasil kajian penulis, 2018.

| No | Tahun | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil/Temuan | Variabel yang Terkait |
|---|-------|---------------------|--|---|---|
| 2 | 2016 | Nika Anggun Pratiwi | Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada BRI Syariah Cabang Natar | Memberikan hasil/gambaran dan penjelasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahap, mulai dari pemberian surat perigatan, kemudian bank melakukan penyehatan berupa <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restrukturing</i> , dan penyitaan dan penjualan barang jaminan apabila proses tidak menuai hasil. ²⁴ | • Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah |
| Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Nika A. Pratiwi, 2016. Meneliti mengenai bagaimana kebijakan yang di ambil bank dalam penyelesaian | | | | | |

²⁴Nika Anggun Pratiwi, "Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar", Skripsi, program studi Ekonomi Islam, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2016) h. 94-95

pembiayaan bermasalah secara umum dan menyeluruh, dan data wawancara diperoleh dari *Costumer Service*, dan bagian *Accounting Officer*.

Sumber : Hasil kajian penulis, 2018

| No | Tahun | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil/Temuan | Variabel yang Terkait |
|---|-------|-----------------|---|--|--|
| 3 | 2016 | Taufik Muhammad | Penjadwalan Kembali/ <i>Rescheduling</i> Tagihan <i>Murabahah</i> di BRIS Pekan Baru | Memberikan penjelasan mengenai mekanisme <i>rescheduling</i> yaitu mulai dari nasabah mendatangi BRIS dengan membawa kelengkapan dokumen untuk negosiasi penjadwalan kembali, ²⁵ kemudian penyelesaian melalui jalur hukum pada nasabah yang tidak menunaikan kewajiban <i>rescheduling</i> . | <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme <i>Rescheduling</i> • Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah |
| Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Muhammad, 2016. Meneliti mengenai <i>Rescheduling</i> Tagihan <i>Murabahah</i> dengan menggunakan metode hukum sosiologis dan menganalisis secara khusus apakah dalam prakteknya BRIS menambah jumlah tagihan yang tersisa dalam proses penjadwalan kembali tagihan <i>murabahah</i> . Dan data wawancara diperoleh dari Kepala Cabang BRIS dan Kepala divisi <i>murabahah</i> . | | | | | |

Sumber : Hasil kajian penulis, 2018

²⁵Taufiq dan Muhammad. *Penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah di BRIS Kota Pekanbaru*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1. 2016, h. 66.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Metode penelitian menurut Sugiono adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan dapat mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.”²⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.²⁸ Adapun karena penelitian ini akan dianalisis, maka dalam prosesnya peneliti mengangkat data dan permasalahan yang di lapangan yang berkenaan dengan penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Bandar Lampung.

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.2.

²⁷*Ibid*, h. 4.

²⁸Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 3.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni studi untuk menemukan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat,²⁹ atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

2. Sumber Data

Data dan sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁰ Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara dan observasi.³¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari wawancara antara peneliti dengan pihak BPRS Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat perantara orang dan dokumen seperti artikel, buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan *rescheduling* pembiayaan bermasalah. Teknik dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan metode studi perpustakaan (*library*

²⁹Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (cet. X) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 74-75.

³⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : rajawali Press, 2015), h. 39.

³¹Moh. Pabunda Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan batuan berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan.³²

3. Populasi

Didalam metodologi penelitian populasi merupakan objek penelitian. Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.³³

Populasi merupakan semua individu atau unit-unit yang menjadi target penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Direktur Utama, dan Kepala Bagian Pemasaran, diBPRS Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan *psikologis*. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁴ Observasi ini akan dilakukan di BPRS Bandar Lampung.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202.

³³Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 129.

³⁴*Ibid*, h.145.

b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi antar dua orang atau melibatkan seseorang yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁵ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan bagian pembiayaan di BPRS bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁶ Dengan metode ini peneliti mendapat data dalam bentuk *hardprint* yaitu cetakan dikertas.

5. Pengolahan Data

- a. Teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sekunder tentang penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*.
- b. Tahap memilih data yang terkumpul dari beberapa sumber.

³⁵Mulyana dedy, *metodelogi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya*(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 274.

- c. Memilah-milah dan menelaah data yang terkumpul dari beberapa sumber mengenai penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*.
- d. Tahap mengklasifikasikan sebuah data yang didapatkan dari lokasi penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan.³⁷ Analisis tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul mengenai penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Bandar Lampung.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti.
- c. Munghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan.

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung ; Alfabeta, 2015), h. 376.

- d. Menganalisis data yang menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada rumusan masalah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir empat) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral.³⁸ Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpun dana dan penyalur dana.

a. Penghimpun Dana Masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk *wadi'ah*, *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. BPRS akan membayar bonus, atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi

³⁸Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), h. 38.

nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah.

b. Penyalur Dana Kepada Masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

c. BPRS Tidak Melaksanakan Transaksi Lalu Lintas Pembayaran

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro *wadiah*. Hal inilah yang membedakan antara bank umum syariah dengan BPRS.³⁹

³⁹Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2011), h. 55.

2. Tujuan BPRS

Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.⁴⁰

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sebagai *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan

⁴⁰Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 129.

benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin 25. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴²

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.⁴³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk

⁴¹Veithzal, Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), h.698.

⁴²[http://www.bi.go.id/UU No. 21 Tahun 2008](http://www.bi.go.id/UU%20No.%2021%20Tahun%202008) (08 April 2018)

⁴³*Ibid*, h.105.

menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*margin*) atau bagi hasil.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴⁵

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.⁴⁶

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud

⁴⁴Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Safitria Insania Press, 2009), h. 85.

⁴⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 234.

⁴⁶*Ibid*, h. 237.

dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.⁴⁷

4) Pembiayaan Sindikasi

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu obyek pembiayaan tertentu.⁴⁸

5) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.⁴⁹

6) Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.⁵⁰

⁴⁷*Ibid*, h. 244

⁴⁸*Ibid*, h. 245.

⁴⁹*Ibid*, h. 248.

⁵⁰*Ibid*, h. 252.

b. Pembiayaan Berdasarkan Akad

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*);

a) Pembiayaan Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribh'u* (keuntungan) yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli,⁵¹ dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.⁵² *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵³

b) Pembiayaan Akad *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.

c) Pembiayaan akad *Istishna'*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.

⁵¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), h. 122.

⁵² *Ibid*, h. 98.

⁵³ *Ibid*, h. 113.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.⁵⁴

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*);

a) Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki bersama-sama, dimana kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, kepemilikan, atau kepandaian (*skill*).

b) Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, h. 99-101.

⁵⁵*Ibid*, h. 102-103.

4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap.

a) *Qardh*

Adalah pinjaman uang yang diberikan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta dari bank.

b) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

c) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk memepatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.⁵⁶

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Kepercayaan

Bank Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk

⁵⁶*Ibid*, h. 106-107.

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

b. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

c. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

d. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

e. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atau dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.⁵⁷

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

a. Pembiayaan Dapat Meningkatkan Arus Tukar-Menukar Barang dan Jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan Merupakan Alat yang Dipakai untuk Manfaatkan *Idle Fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk

⁵⁷Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2011), h. 107-108

mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan Sebagai Alat Pengendali Harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat Mengaktifkan dan Meningkatkan Manfaat Ekonomi yang Ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lain.⁵⁸

5. Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah.

⁵⁸*Ibid*,h. 108

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

a. Analisis 5C

1) *Character*

Mengambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

3) *Capital*

Capital atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam

proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank.

4) *Collateral*

Merupakan angunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Angunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayarangsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap angunan. Hasil penjualan angunan digunakansebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui penngaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar memutuskan permohonan pembiayaan. Dalam prakteknya bank syariah memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip

dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.⁵⁹

b. Analisis 6A

1) Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Di dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjelaskan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu perlu dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

2) Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan dapat memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran.

⁵⁹*Ibid*, h. 120-125

3) Analisis Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

4) Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Faktor yang perlu dilakukan dalam penilaian terhadap aspek manajemen antara lain: Struktur organisasi, *Job description*, Sistem dan prosedur, Penataan sumber daya manusia, Pengalaman usaha, dan *Managemen skill*.

5) Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

6) Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Analisis aspek sosial dan ekonomi antara lain meliputi: Dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan, pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja, pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara, dan debitur tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

Keenam aspek dilakukan analisis satu persatu, kemudian disusun kesimpulan secara menyeluruh. Dari hasil kesimpulan diperoleh apakah permohonan kredit calon nasabah disetujui atau ditolak. Apabila permohonan ditolak maka bank akan memberi informasi kepada calon nasabah secara lisan atau dengan mengirimkan surat penolakan atas permohonan pembiayaan. Apabila bank menyetujui maka bank akan menghitung besar persentase pembiayaannya, jangka waktunya, angsuran yang diminta, cara pencairannya, jadwal angsuran dan dokumen yang perlu disiapkan perusahaan.⁶⁰

6. Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan

Tahap selanjutnya setelah pembiayaan disetujui adalah administrasi dan pembukuan pembiayaan yang meliputi beberapa proses berikut.

⁶⁰*Ibid*, h. 126-134.

a. Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan memperoleh keputusan dari pejabat pemutus, bank akan memberikan Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan (SPKP) untuk nasabah. Penerbitan SPKP bertujuan untuk memastikan :

- 1) Syarat pembiayaan sesuai dengan usulan/persyaratan yang disetujui dan ditetapkan, termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan.
- 2) Bersifat tidak mengikat secara legal. Pemberian fasilitas pembiayaan tergantung pada pemenuhan ketentuan / kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan serta kesesuaian dengan prosedur persetujuan pembiayaan.
- 3) Konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan pengikatan angunan serta pengikatan lainnya yang terkait.

b. Akad Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati. Perjanjian pembiayaan mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan antara lain :

- 1) Domisili hukum
- 2) Kondisi pembiayaan yang telah disetujui (jumlah, nisbah/margin, persyaratan, dan lainnya) telah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.
- 3) Telah dipastikan bahwa perjanjian pembiayaan mengikat dan berkekuatan tetap.
- 4) Pembiayaan ditandatangani nasabah pembiayaan atau yang berwenang dari perusahaan nasabah.

c. Pengikat Angunan

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen angunan sehingga dapat melakukan pengikatan. Dokumentasi / pengikatan angunan harus lengkap / sempurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

d. Pencairan Pembiayaan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah.

e. Pemantauan Pembiayaan

Setelah fasilitas pembiayaan diberikan/dicairkan, langkah bank selanjutnya adalah melakukan aktivitas pemantauan untuk memastikan

bahwa penggunaan fasilitas pembiayaan berdampak pada kinerja usaha nasabah, dan memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada bank.

Pemantauan pembiayaan oleh bank terhadap nasabah dilakukan melalui beberapa kegiatan terhadap:

- 1) Pelaksanaan pemberian pembiayaan;
- 2) Kelengkapan dokumen dan administrasi pembiayaan;
- 3) Perkembangan usaha nasabah pembiayaan
- 4) Penggunaan pembiayaan
- 5) Riwayat pembayaran
- 6) Kinerja Keuangan
- 7) Jaminan (barang jaminan, nilai jaminan, kesempurnaan jaminan).⁶¹

7. Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011, penilaian kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lima jenis kolektibilitas,⁶² diantaranya:

a. Lancar (*Pass*)

Apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif;

⁶¹Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 125-128.

⁶²Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 95.

atau bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*).

b. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau kadang-kadang terjadi cerukan; atau mutasi rekening masih relatif aktif; atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau sering terjadi cerukan; atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtfull*)

Apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran dan/atau bunga yang telah malampaui 180 hari; atau terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau terjadi kapitalisasi bunga; atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁶³

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihun, wa baa’u asy-syai murabahahan*” artinya perdagangan yang menguntungkan. Dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.⁶⁴

Transaksi *murabahah* lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam

⁶³Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar’ISystem* (Jakarta : Raja Grafindo. 2007), h. 474

⁶⁴Faturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta : Sinar Grafindo,2013), h. 108.

nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁶⁵

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pihak nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).⁶⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan, dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

⁶⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo 2010), h. 113.

⁶⁶*Ibid*, h. 115.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun Murabahah

1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjual adalah bank syariah.

2) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

3) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Obyek ini harus ada fisiknya.

4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5) Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

b. Syarat Jual Beli

1) Pihak yang berkad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2) Objek Jual Beli

Barangnya ada sesuai dengan yang dijelaskan, barang yang akan dijual milik sah penjual, berwujud dan merupakan barang halal.

3) Harga

Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran di sepakati bersama antara penjual dan pembeli.⁶⁷

3. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

⁶⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 136-138.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa : 29)

b. Hadits

Dari Shuaib Al-Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah (Murabahah) dan bercampur tepung dengan 25 gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah).⁶⁸

c. Undang-Undang

- 1) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.⁶⁹
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 No. 1 Huruf D yang berbunyi “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah.”

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

⁶⁸Op.cit, h. 136.

⁶⁹Rizal,Aji,Ahim. Akutansi Perbankan Syariah (Jakarta : Selemba Empat, 2014), h. 160.

4. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan *murabahah* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.

b. Bagi Nasabah

Manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.⁷⁰

D. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁷¹

Risiko Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan

⁷⁰Wangasawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*(Jakarta : PT Gramedia PustakaUtama 2012), h. 205

⁷¹Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 74.

berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.⁷²

Kegagalan dalam suatu transaksi pembiayaan/pemberian kredit dapat disebabkan oleh berbagai macam kejadian, antara lain :

1. *Self-dealing* (aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri), yaitu adanya keterlibatan pegawai bank dalam kegiatan usaha nasabah karena adanya kepentingan pribadi karena adanya kepentingan tersebut).
2. *Anxiety for Income* (haus akan laba), namun kurang mengupayakan sumber pengembalian, yaitu arus kas.
3. Kompromi terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat.
4. Tidak tersedia kebijakan prosedur perkreditan yang memenuhi syarat suatu proses pengelolaan kredit yang baik.
5. Informasi kredit untuk pengambilan keputusan tidak lengkap
6. Lambat dalam mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian.
7. Menggampangkan permasalahan yang terjadi.
8. Tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten.
9. Kurang memiliki kemampuan teknis.
10. Ketidakmampuan melakukan seleksi atas risiko.
11. Pemberian kredit yang melampaui batas.
12. Tekanan persaingan usaha.⁷³

⁷²Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. I, No. 1, Juni 2016, h. 102

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁷⁴

E. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara dini merupakan keharusan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank. Bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan pedoman oleh karyawan bagian pembiayaan dan pengawasan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.⁷⁵

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan oleh bank syariah melalui prinsip 3 R yaitu :

⁷³Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 96-97.

⁷⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). h. 66.

⁷⁵Nur Eka Prasetyana, dkk, “*Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah*”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 4, Oktober 2014.

1. *Rescheduling*

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah,⁷⁶ yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.⁷⁷ *Rescheduling* diatur pula di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* yang menjelaskan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.⁷⁸

a. Indikator *Rescheduling* pembiayaan Modal Kerja

Agar kolektibilitas nasabah dapat kembali lancar, maka *rescheduling* nasabah pembiayaan modal kerja harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Nasabah pembiayaan berpotensi atau mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok, atau margin pembiayaan. Dikarenakan nasabah tidak mampu manajemen keuangan dengan baik atau faktor lainnya yang mempengaruhi menurunnya usaha nasabah.

⁷⁶Wangsanwidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2012), h. 448.

⁷⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.98.

⁷⁸Taufiq,Muhammad, *Penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah pada perbankan syariah*, JurnalPerspektif Hukum, Vol. 16 No. 1 Mei 2016. h.61.

- 2) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperatif. Apabila nasabah masih mempunyai itikad baik untuk berusaha memenuhi kewajibannya sebagai debitur maka bank akan mensupport usahanya kembali dengan diberikan perpajangan waktu angsuran agar nasabah mampu menjalankan aktivitas bisnisnya seperti semua dan mendapat kelonggaran dalam mengangsur pembiayaan.
- 3) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan diperoyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan penjadwalan kembali.⁷⁹

b. Contoh Perhitungan *Rescheduling*

Bapak Ahmad mengajukan pembiayaan *murabahah* bank pembiayaan rakyat syariah untuk membantu menambah modal usaha mikro sembakonya sebesar Rp 20.000.000,- dengan tenor 1 tahun dan margin 2 % per bulan, jumlah angsuran pokok sebesar Rp 1.670.000,-

Karena banyaknya supermarket yang menjamur dan pendapatan digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, serta jangka waktu terlalu dekat, maka bapak ahmad menunggak selama 3 bulan dan tergolong sebagai kolektibilitas pembiayaan kurang lancar. Berdasarkan kasus ini maka pihak bank memberikan keringan berupa penjadwalan kembali (*resheduling*) dan dinyatakan bahwa nasabah

⁷⁹*Op.cit*, h. 131

mendapat keringanan cicilan pembayaran atau perpanjangan waktu masa tagihan *murabahah*. Jika secara normal Ahmad membayar cicilan selama 1 tahun, maka setelah di *rescheduling* nasabah membayar cicilan dapat diperpanjang menjadi 24 bulan atau 2 tahun, sementara angsuran yang semula Rp 1.670.000,- per bulan menjadi Rp 835.000 per bulan.

c. Dasar Hukum *Rescheduling*

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan” (Q.S Al-Baqarah : 280)⁸⁰

2. Hadits

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya : “Allah mengasihi orang yang bermurah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli dan sewaktu menagih.” (HR. Bukhari)⁸¹

d. Manfaat dan Mudharat *Rescheduling*

Manfaat *rescheduling* bagi bank adalah pembiayaan yang telah dikeluarkan dapat kembali, bagi pihak nasabah dapat memenuhi kewajibannya, sedangkan mudharat bagi bank memperoleh pembiayaan

⁸⁰ Al-Qur'an Terjemahan. (Q.S Al-Baqarah : 280)

⁸¹ Faturrahman Djamil *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2012), h. 78

kembali akan lebih lama, bagi pihak nasabah jangka waktu pembiayaan lebih lama.

2. *Reconditioning*

Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu/atau memberi potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank.

3. *Resctrukturing*

Penataan kembali (*Resctrukturing*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi :

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.⁸²

Dengan dasar prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut :

⁸²Trisadini, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta :Bumi Aksara, 2015), h. 110.

a) Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan :

- (1) Nasabah melunasi / mengangsur kewajiban pembiayaan / pinjamannya ;
- (2) Nasabah/pihak ketiga pemilik anggunan menjual sendiri barang anggunan secara sukarela ;
- (3) Dilakukan perjumpaan utang (kompensasi) ;
- (4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembauran utang / novasi subjektif) ; atau
- (5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*second enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh

upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik angunan.

b) Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHP Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syari'ah.

c) Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan :

- (1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggung jawab berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji/*beding van eigenmatige verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- (2) Penjualan angunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate eksekusi* (Pasal 1155 KUH Perdata)
- (3) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999).

d) Penyelesaian Melalui Peradilan Agama (*Al-Qadha*)

Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga bisnis, yang selama ini pengadilan yang diberi tugas kewenangan adalah pegawai negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkan UU No. 3 tahun 2006 menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Pengadilan Agama.

e) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (*Tahkim*)

Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (domain of arbitration), maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase syariah. Badan Arbitrase Syariah, pada saat ini baru ada satu yaitu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁸³

⁸³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h. 96-101.

F. Landasan Fatwa DSN tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, yaitu:

1. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali pembayaran *murabahah*, bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan jangka waktu dengan ketentuan :
 - a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
 - b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
 - c. Perpajangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁸⁴
2. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah bahwa LKS Boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan dengan ketentuan :
 - a. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
 - b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan

⁸⁴Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa uang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah.⁸⁵



⁸⁵Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah yang tidak mampu membayar.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung

1. Sejarah BPRS Bandar Lampung

BPRS Bandar Lampung sebagai lembaga keuangan syariah bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan khususnya bagi anggota kopraasi dan juga dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh pemerintah kota Bandar Lampung terhadap BPRS sakai sembayan yaitu bank syariah pertama di propinsi lampung yang beroperasi sejak tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa bapak poedjono pranyoto Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, ICMI Orwil Lampung dan MUI Propinsi Lampung dengan modal dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di kecamatan Natar-Lampung Selatan. Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut dan pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah (NPF) dan manajemen pengelolaan bank yang kurang profesional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar yaitu mulai dari kekurangan kecukupan

modal (CAR) dan kesulitan likuiditas yang berakibat bank ini menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai rencana untuk mendirikan BPR Syariah (Bank Syariah) dengan membentuk Tim Pendirian Bank Syariah yang bekerjasama dengan Konsultan dari Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari hasil kajian tersebut dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah.

Adapun kesimpulan dari hasil kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah merekomendasikan sebagai berikut :

- a. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi menjadi Bank Pasar Syariah.
- b. Menambah divisi Syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung, atau
- c. Mendirikan bank baru yaitu Bank Pasar Syariah Bandar Lampung.

Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank Syariah maka selanjutnya rencana pendirian Bank Syariah tsb direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal

13 Oktober 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.2.957.000.000,-.

Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono, SH. No. 20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Akuisisi dan Akta Notaris Bambang Abiyono, SH Nomor 21 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan Ham RI pada tanggal 04 November 2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.957.000.000,- dari total modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp. 5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp.3.978.500.000,- atau 79,57%.

Pada Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas juga disetujui antara lain:

- a. Menambah Modal Dasar Perseroan dari Rp. 5 Milyar menjadi Rp. 10 Milyar.
- b. Mengganti nama BPRS Sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar Lampung.
- c. Melakukan Relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke wilayah Bandar Lampung.
- d. Melakukan Reorganisasi Pengurus Perseroan.

Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung.

Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan karena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan

banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.⁸⁶

2. Identitas Perusahaan

Tabel. 3.1

Identitas Perusahaan

| | | |
|------------------------------|---|--|
| NAMA PERUSAHAAN | : | PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAHBANDAR LAMPUNG |
| NPWP | : | 02.895.636.5-323.000 |
| LEGALITAS | : | AHU.53361.AH.01.02.TH.2019 |
| NO. DAN TANGGAL IZIN PRINSIP | : | S-1269/MK,17/1994 TANGGAL 29 AGUSTUS 1994 |
| | : | KEP. 013/KM,17/1996 08 JANUARI 1996 |
| TANGGAL PEMBENTUKAN | : | 22 DESEMBER 2008 |
| MODAL DASAR | : | Rp. 10.000.000,00 |
| ANGGARAN DASAR | : | AKTA NOTARIS NO.09 TANGGAL 01-05-2009 |
| | : | NOTARIS BAMBANG ABIYONO, S.H. |
| ALAMAT | : | JL. PANGERAN ANTASARI NO. 148 BANDAR LAMPUNG |

Sumber : BPRS Bandar Lampung 2018

⁸⁶Sejarah BPRS Bandar Lampung. <http://www.banksyariahbandarlampung.ac.id>, diakses pada 19 April 2018.

3. Visi, Misi dan Komitmen

1. **Visi** Menjadi BPR Syariah terbaik untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan di Propinsi Lampung

2. **Misi** senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan handal,

Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan turut mendukung pembangunan di Propinsi Lampung melalui sektor Perbankan Syariah. Membina kadar-kadar wirausahawan yang berorientasi syariah sehingga menjadi bankable dan mandiri. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. **Motto** Berdasar Syariah Insya Allah Lebih Barakah.

4. Susunan Pengurus

Berdasarkan surat keputusan walikota Bandar Lampung Nomor 468/23/HK/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang penerapan pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung yang telah dilakukan fit and Proper Test oleh Bank Indonesia dengan surat Bank Indonesia No. 10/31/DPBS/Bdl tanggal 04 November 2008 perihal hasil Fit and Proper Test, maka pengurus perseroan BPRS Bandar Lampung periode 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : A Rahman Mustafa, S.E., MM, Ak

Komisaris Anggota : Yusran Effendi, S.E., MM.

2. Dewan Pengawas Syariah : Ismail Saleh,S.Hi

: Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

3. Direksi :

Direktur Utama : Ridwansyah,S.E.,M.E.Sy

Direktur : Marsono,S.E.

5. Perizinan

1. Perizinan pada BPRS Bandar Lampung: Persetujuan Prinsip Departemen Keuangan RI, No. S-1269/MK.17/1994 Tanggal 29 Agustus 1994.
2. Izin Usaha Menteri Keuangan RI. No. Kep-013.MK17/1996 Tanggal 08 Januari 1996.
3. Izin Usaha Bank Indonesia, No. 28/205/UPBR/Bdl Tanggal 13 Februari 1996.
4. Persetujuan Akuisisi Bank Syariah. No. 10/16/DPbs/Bdl Tanggal 18 Februari 2008

6. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung adalah melayani masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. penanganan pembiayaan bermasalah serta melayani jasa lainnya yang dimungkinkan berdasarkan prinsip syariah.

7. Perkembangan Usaha

Pada tanggal 22 Desember 2008 BPRS Bandar Lampung mulai beroperasi yang diresmikan oleh Bank Indonesia, sejak saat itu seluruh kegiatan usaha yang ada di BPRS Bandar Lampung dilakukan. Perkembangan volume usaha, total asset, total pembayaran, total dana pihak ketiga, dan pinjaman yang diterima dari bank lain posisi 3 (tiga) tahun terakhir atau 31 Desember 2014 sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Usaha
(Dalam Ribuan Rupiah)

| Keterangan | Des 2015 | Des 2016 | Des 2017 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Asset | 61.225.224 | 67.326.539 | 73.854.569 |
| Pembiayaan | 47.052.279 | 51.140.286 | 56.989.896 |
| Dana Pihak Ketiga | 37.808.825 | 40.169.598 | 48.082.206 |
| Pinjaman yg Diterima | 13.998.467 | 17.144.152 | 13.382.317 |
| Modal Setor | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |

Sumber : BPRS Bandar Lampung 2018

8. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung

Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung :

Dewan Komisaris : H.A. Rahman Mustafa, S.E.,M.M.Ak.

Yusran Effendi, S.E., M.M.

Dewan Pengawas Syariah : Ismail Saleh, SHI

Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

Direksi : Dirut : Ridwansyah, S.E., M.E.Sy

Direktur : Marsono, S.E.

Pengawasan Internal : Putri Deli Suciati, S.E.

Bagian Pemasaran

1. Kepala Bagian : Dephi Wibowo

2. Funding Officer : Zuli Akhmaliah

3. Account Officer : Septi Mastaliza, S.E.

Berlian Feni A

1. Adm. Pembiayaan : Siti Suryati, A.Md

Dede Ali Ma'rifat, S.Kom

2. Tim Remedial : A. Ferdiansyah, S.E.

Akhmad Ikbil

Bagian Operasional dan Umum

1. Kepala Bagian : Roslina Pragestin, S.E.

2. Pesonalia : Ahmad Ferdiansyah, S.E.

3. Umum : Wahyu Atmojo

4. Accounting : Jumhuri, S.E.

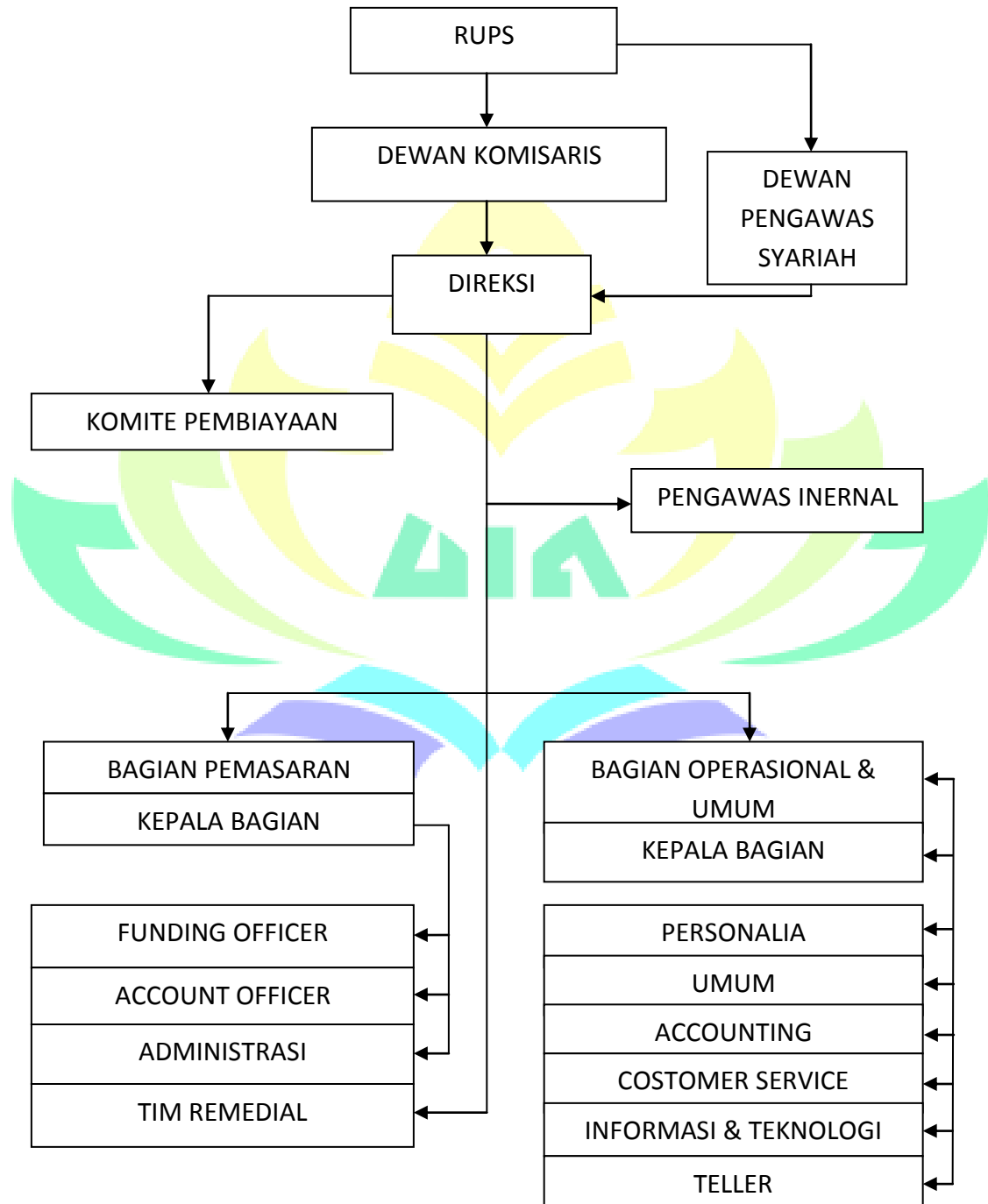
5. Customer Service : Siti Nurvina, S.Sos.

6. Teller : Misna Warita

7. Informasi Teknologi : Adi

Gambar 1.3

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH BANDAR LAMPUNG



Sumber : BPRS Bandar Lampung 2018

9. Produk-Produk BPRS Bandar Lampung

Dalam kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung melayani masyarakat dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu:

1. Simpanan

Jenis simpanan

- a. Tabungan Syariah Titipan
- b. Tabungan Syariah Umum
- c. Tabungan Pelajar
- d. Tabungan Sikencana
- e. Tabungan Haji
- f. Tabungan Qurban
- g. Deposito Berjangka Syariah
- h. Deposito Syariah (bagi hasil)

Deposito Syariah merupakan simpanan berjangka berdasarkan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*) yang disediakan untuk nasabah. Dengan prinsip ini, deposito nasabah diperlakukan sebagai investasi yang digunakan oleh Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat pengusaha maupun perorangan dalam bentuk pembiayaan *Ijarah* dan *Al-Murabahah* yang dikelola secara profesional dan memenuhi aspek

Syariah. Pengelolaan dana nasabah ini dibagihasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati.⁸⁷

Manfaat :

- a. Membantu program investasi nasabah.
- b. Dapat dijadikan sebagai agunan pinjaman/pembiayaan.

Keunggulan :

- a. Aman karena dijamin oleh Pemerintah atau LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
- b. Bagi hasil dibayar rutin setiap bulan dan dibukukan langsung ke rekening tabungan nasabah secara otomatis.
- c. Jangka waktu dapat diperpanjang secara otomatis dan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan.
- d. Setoran minimal per bilyet/rekening hanya Rp.2.000.000,-
- e. Nisbah kompetitif.

2. Pembiayaan

- a. Produk Pembiayaan berdasarkan akad:
 - 1) Pembiayaan jual beli (Al-Murabahah)
 - 2) Pembiayaan bagi hasil (Al-Mudharabah)
 - 3) Pembiayaan penyertaan modal (Al-Musyarakah)
 - 4) Pembiayaan untuk sewa manfaat (Ijarah Multijasa)
 - 5) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)

⁸⁷Dokumentasi, *Produk-produk BPRS Bandar Lampung*, diperoleh pada 20 April 2018.

b. Produk pembiayaan berdasarkan penggunaan:

- 1) Modal kerja (Al-Murabahah, Al-Mudharabah)
- 2) Investasi (Al-Murabahah)
- 3) Konsumtif (Al-Murabahah, Al-Ijarah, Al-Qardh)

c. Produk pembiayaan berdasarkan sasaran penyaluran:

- 1) Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (UKM)
- 2) Pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 3) Pembiayaan Pegawai BUMN dan BUMD
- 4) Pembiayaan Pegawai Perusahaan Instansi / Swasta
- 4) Pembiayaan Kebajikan (Al-Qardh)

3. Jasa lainnya:

Produk jasa lainnya:

- 1) Jasa transfer dana antar bank
- 2) Fasilitas penjualan pulsa
- 3) Jasa pembayaran rekening listrik.⁸⁸

B. Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan produk pembiayaan unggulan yang ada di BPRS Bandar Lampung, pembiayaan *murabahah* di BPRS berdasarkan penggunaannya diantaranya adalah : pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan oleh pegawai, baik pegawai Negeri

⁸⁸Dokumentasi BPRSBandar Lampung Pada 20 April 2018.

maupun Pegawai Swasta, dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Sampai dengan Desember 2017 jumlah pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung berjumlah Rp. 56.989.896.463 pembiayaan.⁸⁹

1. *Procedur Pembiayaan Murabahah*

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung diantaranya :

- a. Fotocopy KTP suami dan istri;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Fotocopy Buku Nikah;
- d. Rekening Listrik, Telepon, dan Pam;
- e. Slip gaji dan Rekening Tabungan;
- f. Fotocopy jaminan berupa BPKB/Sertifikat tanah, untuk jaminan di lampirkan PBB.⁹⁰

2. *Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah*

BPRS Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah. Tabel 3.4 menunjukkan kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Bandar Lampung periode tahun 2015-2017.

⁸⁹Ridwansyah, *Wawancara Pribadi*, BPRS BandarLampung, 24 April 2018.

⁹⁰Brosur Pembiayaan BPRS Bandar Lampung 2018

Tabel 3.3
Daftar Kolektibilitas Pembiayaan *Murabahah*
BPRS Bandar Lampung 2014-2016

| Tahun | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | Total Pembiayaan | Nasabah |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| 2015 | 98.92 % | 0.39 % | 0.14 % | 0.51 % | 47.052.279.908 | 1.029 |
| 2016 | 98.99 % | 0.28 % | 0.18 % | 0.53 % | 51.140.286.301 | 1.105 |
| 2017 | 98,94 % | 0.35 % | 0.15 % | 0.52% | 56.989.896.463 | 1.182 |

Sumber : BPRS Bandar Lampung 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat kondisi kolektibilitas pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan status kurang lancar, diragukan dan macet yang harus di *rescheduling* oleh BPRS Bandar Lampung dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan jenis risiko yang harus dihadapi oleh BPRS Bandar Lampung yaitu risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah.

C. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung

Dalam menjalankan operasional perbankan yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, lembaga keuangan bank termasuk BPRS tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal dan eksternal oleh nasabah. Adapun dari faktor internal diantaranya: adanya itikad kurang baik dari nasabah, adanya unsur ketidaksengajaan dari debitur, dimana nasabah ada keinginan untuk membayar kewajiban tetapi dana tersebut digunakan untuk

kebutuhan lain yang lebih mendesak. Sedangkan faktor eksternal diantaranya : kegagalan usaha debitur, adanya perubahan politik maupun ekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola usaha.⁹¹

D. Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung

Penyelamatan pembiayaan bermasalah sejak dini merupakan keharusan bank agar dana yang di berikan dapat ditarik kembali. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bandar Lampung melalui proses *rescheduling* pada dasarnya tidak dibedakan berdasarkan akadnya semua dilakukan berdasarkan prosedur yang sama, termasuk pembiayaan *murabahah*.

Usaha yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* terdiri dari beberapa tahapan diantaranya :

1. Penyelesaian melalui jalur Non-Litigasi
 - a. Penagihan secara insentif atau melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Yaitu dengan cara pihak BPRS Bandar Lampung melakukan *bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo.

⁹¹Dephi Wibowo, *Wawancara Pribadi*, BPRS Bandar Lampung 11 Mei 2018

- b. Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam tahap ini jika nasabah dalam waktu 10 hari masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak BPRS memberikan surat peringatan (SP) I, kemudian jika tunggakannya melampaui waktu 11 sampai 20 hari maka akan diberikan SP II dan seterusnya jika lebih dari 20 hari atau sampai sebulan nasabah masih tidak membayar maka pihak BPRS Bandar Lampung akan memberikan SP III.
- c. Penjadwalan kembali. Setelah melewati beberapa tahapan diatas dan nasabah pembiayaan bermasalah masih tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dalam hal ini BPRS Bandar Lampung dapat memberikan keringan berupa pengubahan jangka waktu pembiayaan (*rescheduling*).

Rescheduling dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran misalnya dari 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah.⁹²

2. Penyelesaian melalui Jalur Litigasi

a. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan Agama (*Al-qadha*)

Jika langkah-langkah sebelumnya tidak menemukan solusi permasalahan, dan nasabah tidak memiliki itikad baik dan nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar hutang dan kewajibannya maka

⁹²Dephi Wibowo, *Wawancara Pribadi*, BPRS Bandar Lampung 11 Mei 2018

BPRS mengajukan ke pengadilan agama sebagai pemberi keputusan atas sengketa untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

b. Likuidasi Jaminan.

Jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka pihak BPRS Bandar Lampung dengan kesepakatan bersama dengan nasabah akan menjual jaminan. Jaminan tersebut dijual oleh debitur yang bersangkutan tanpa melalui lelang atau dengan cara lelang. Kemudian nasabah melunasi hutangnya dari hasil penjualan jaminan.

c. Lelang.

Lelang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung jika nasabah kabur dan tidak mau menjual jaminan yang disepakati dengan menunggu keputusan dari pengadilan agama.⁹³

⁹³Dephi Wibowo, *Wawancara Pribadi*, BPRS Bandar Lampung 11 Mei 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung.

Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh bank kepada nasabah, yang dilandaskan atas dasar kepercayaan. Banyaknya penduduk Indonesia yang berkerja pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadikan bank sebagai wadah untuk membantu masalah permodalan. Bank syariah merupakan bank dengan prinsip syariah yang mampu memenuhi kebutuhan layanan perbankan yang dibutuhkan nasabah khususnya kaum muslim.

Dalam menyalurkan pembiayaan khususnya dengan akad *murabahah* BPRS Bandar Lampung memberikan layanan dalam bentuk fasilitas: modal kerja, investasi, dan konsumtif. Salah satu produk yang banyak dimanfaatkan nasabah adalah produk pembiayaan untuk penggunaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pengusaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam memberikan pembiayaan modal kerja melalui akad *murabahah* terlebih dahulu bank melihat apakah nasabah lebih membutuhkan barang atau uang, apabila nasabah lebih membutuhkan uang

untuk kebutuhan usahanya maka bank akan memberikan fasilitas pembiayaan berupa uang dan sebaliknya.

Secara umum proses pembiayaan *murabahah* untuk penggunaan produktif dan pembiayaan untuk penggunaan konsumtif adalah sama. Bank harus menganalisis kelayakan nasabah yang terseleksi berdasarkan analisis 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Dan kemampuan nasabah dalam mengangsur kembali pembiayaannya. Namun, setiap bisnis pasti tidak luput dari risiko begitu juga bisnis bank. BPRS Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah, yaitu risiko tidak kembalinya dana oleh nasabah setelah jatuh tempo.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari perusahaan itu sendiri, seperti Informasi tentang analisis 5 C nasabah tidak didokumentasi dengan lengkap, tidak terdapat pengawasan pembiayaan yang konsisten, pemberian pembiayaan melampaui batas, dan timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan kondisi perekonomian pedagang, adanya itikad kurang baik dari nasabah, adanya unsur kesengajaan dari nasabah, dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, perubahan

politik maupun ekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola usaha.

Berdasarkan pernyataan diatas, masalah yang harus dihadapi oleh BPRS Bandar Lampung adalah bagaimana cara agar dana pembiayaan dapat ditarik kembali, dan nasabah dapat membayar kewajibannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah secara dini merupakan keharusan bank agar dana yang dikeluarkan dapat ditarik kembali. Usaha yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam menyelesaikan pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* terdiri dari beberapa tahapan yaitu melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Tahapan melalui jalur non-litigasi diantaranya :

1. Penagihan secara insentif dengan cara pihak BPRS Bandar Lampung melakukan *bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo. mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo.
2. Pemberian surat peringatan atau teguran, jika dalam waktu 10 hari nasabah masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak BPRS memberikan surat peringatan (SP) I, jika tunggakannya melampaui waktu 11 sampai 20 hari maka akan diberikan SP II, dan seterusnya jika lebih dari 20 hari atau sampai sebulan nasabah masih tidak membayar maka akan diberikan SP III.

Setelah melalui tahapan diatas, dan nasabah masih tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah Bank

melakukan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali / *Rescheduling* (penjadwalan kembali) tagihan pembayaran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan *murabahah*.⁹⁴

Proses *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan serta jangka waktu) dan jumlah angsuran. Memperpanjang jangka waktu misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah,⁹⁵ sehingga nasabah yang mengalami kolektibilitas kurang lancar dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengangsur pembiayaan dan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

BPRS Bandar Lampung menetapkan bahwa kolektibilitas nasabah yang bermasalah diklasifikasikan menjadi 5 kolektibilitas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

| No | Lama Tunggakan | Status Kolektibilitas |
|----|---------------------|------------------------|
| 1 | Tidak ada tunggakan | Lancar |
| 2 | 1-90 hari | Dalam perhatian khusus |

⁹⁴Dephi Wibowo, *Wawancara Pribadi*, BPRS Bandar Lampung 11 Mei 2018

⁹⁵*Ibid*, wawancara Pribadi, 11 Mei 2018

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 3 | 90-120 hari | Kurang lancar |
| 4 | 121-180 hari | Diragukan |
| 5 | >180 hari | Macet |

Sumber : BPRS Bandar Lampung 2018

Tunggakan angsuran selama 90 sampai dengan diatas 180 hari diidentifikasi bahwa nasabah tersebut perlu dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* dilaksanakan oleh BPRS Bandar Lampung sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban dalam cicilan *murabahah*.

BPRS Bandar Lampung dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan modal kerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

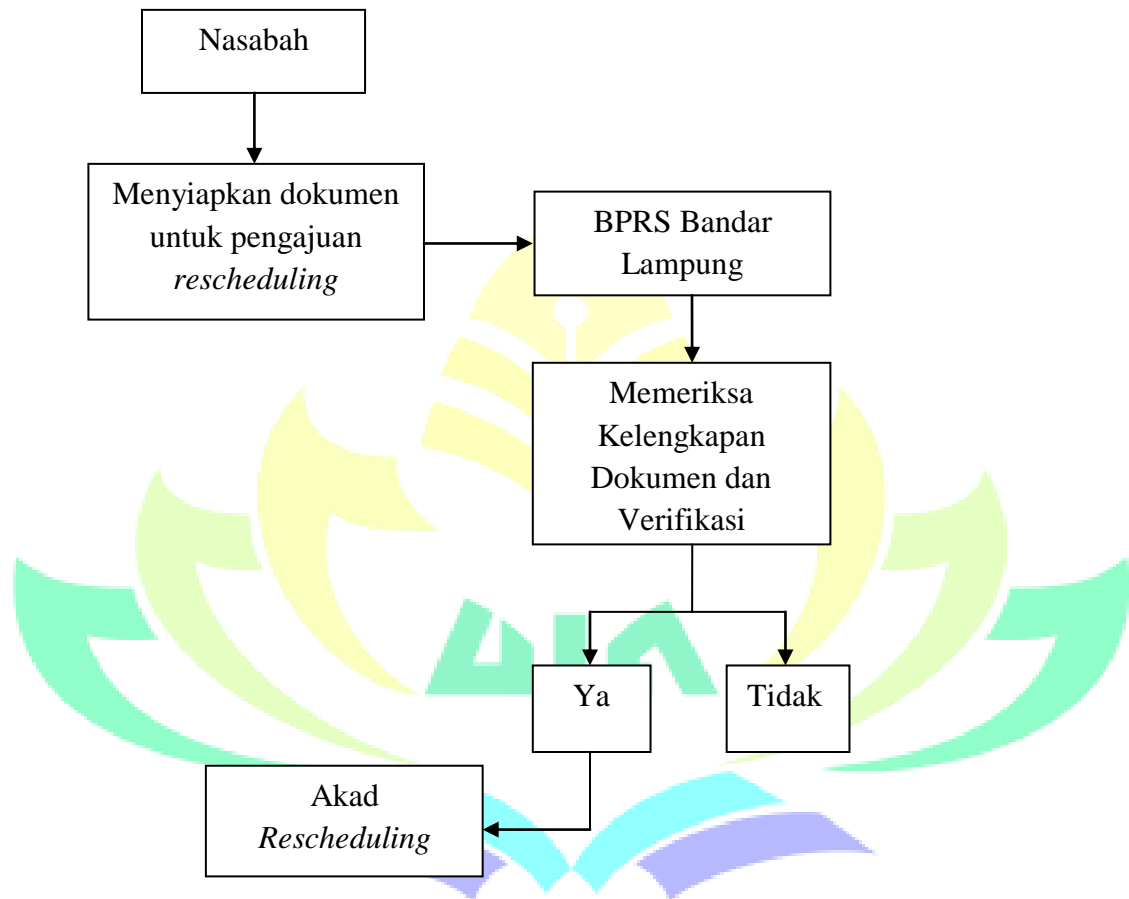
- Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik.
- Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *rescheduling*.⁹⁶

Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung terhadap nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat digambarkan sebagai berikut :

⁹⁶*Ibid, wawancara Pribadi, 11 Mei 2018*

Gambar 4.1

Proses Pengajuan *Rescheduling*



Sumber : Data diolah 2018

Penjelasan proses *rescheduling* pada gambar diatas dimulai dengan nasabah menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk pengajuan *rescheduling* kemudian menyerahkan kepada BPRS untuk diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria nasabah pembiayaan modal kerja memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan negosiasi akad penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Bandar Lampung dapat dilihat pada contoh kasus berikut:

Bapak Syaifudin mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bandar Lampung untuk menambah modal usaha sepatunya dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembiayaan Rp 48.000.000,-

Jangka waktu angsuran 24 bulan.

Margin 1,3% per bulan sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.

Jumlah angsuran pokok Rp 2.000.000,- per bulan.

Namun dikarenakan adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak selama beberapa bulan, membuat bapak Syaifudin mengalami penurunan kemampuan membayar dan tergolong sebagai kolektibilitas pembiayaan kurang lancar. Maka dalam hal ini pihak BPRS Bandar Lampung melakukan penyelesaian pembiayaan dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*).

Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian akad penjadwalan kembali (*resheduling*) dinyatakan bahwa nasabah mendapat keringanan cicilan pembayaran atau perpanjangan waktu masa tagihan *murabahah*. Jika secara normal Bapak Syaifudin membayar cicilan selama 2 tahun, maka setelah di *rescheduling* nasabah membayar cicilan dapat diperpanjang menjadi 36 bulan atau 3 tahun, sementara angsuran yang semula Rp 2000.000,- per bulan menjadi Rp 1300.000 per bulan. Berdasarkan contoh kasus ini jika

setelah di *rescheduling* nasabah masih kesulitan untuk membayar kewajibannya maka kebijakan yang diberikan oleh bank adalah dengan mengurangi persentase margin/bagi hasil setiap bulannya.

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum.

Kesimpulannya, jika nasabah dalam keadaan (ada itikad baik), maka permasalahan akan diselesaikan melalui kekeluargaan, dengan cara diberikan perpanjangan waktu tagihan pembiayaan (*rescheduling*) demi menjaga hubungan baik dengan nasabah sehingga nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur, dan melalui jalur hukum apabila nasabah (tidak ada itikad baik) yaitu melalui peradilan agama atau eksekusi jaminan, dengan cara pihak BPRS Bandar Lampung dengan kesepakatan bersama dengan nasabah akan menjual jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan menjual jaminan milik nasabah. Jika penjualan jaminana melebihi nilai hutang maka BPRS mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari nilai hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dephi Wibowo sebagai Kepala Bagian Pemasaran di BPRS Bandar Lampung diperoleh bahwa BPRS Bandar Lampung dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah melalui proses *rescheduling* dinilai lebih efektif karena sekitar 50 % nasabah dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

Direktur utama BPRS Bandar Lampung, Ridwansyah. Menyatakan bahwa upaya dan langkah yang dilakukan untuk mengurangi angka pembiayaan bermasalah atau (*non performing finance/NPF*) adalah memiliki tim khusus penagihan. Mana yang perlu di *rescheduling* harus dilakukan, sedangkan PPAP (penghapusan penyisihan aktiva produktif) yang sudah lama akan dihapus buku walaupun nilainya tidak besar, untuk menjaga kualitas pembiayaan. PPAP (penghapusan penyisihan aktiva produktif) merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi risiko kerugian.

Berdasarkan pernyataan di atas BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI tentang *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah yaitu dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan *rescheduling*

terhadap nasabah dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.⁹⁷

B. Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang *syumul* atau menyeluruh yang aturan-aturannya berkaitan dengan semua aspek dan bidang kehidupan umat manusia. Dengan datangnya agama Islam, maka sempurnalah petunjuk hidup kita sebagai manusia. Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Sedangkan universal bermakna Islam berlaku bagi semua zaman, semua kehidupan dan semua tempat serta dapat diterima oleh semua manusia.

Dalam *bermuamalah* Islam mengkomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Tujuan adanya prosedur tersebut agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian. Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah atau etika dalam utang-piutang, Islam telah mewajibkan bagi setiap orang yang

⁹⁷Bank Indonesia, *PBI Nomor 13/9/2011*, (07 Juni 2018).

berhutang agar melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan, selama yang bersangkutan mampu mampu membayar kewajibannya kembali.

Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 280)⁹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa “Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dan dalam keadaan sulit untuk membayar utangnya. Dan hendaknya yang memberi utang memberi waktu penangguhan sampai yang berhutang dalam keadaan lapang. Dan jika yang berhutang itu tidak sanggup lagi untuk membayar utangnya, maka lebih baik yang memberi utang mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, sebagian atau seluruhnya atau dengan jalan yang lebih baik.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad

⁹⁸ Al-Qur'an Terjemahan. (Q.S Al-Baqarah : 280)

(keuntungan). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori teori ekonomi Islam.⁹⁹

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹⁰⁰

2. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara

⁹⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.17

¹⁰⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 14-15.

hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber dayadiarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.¹⁰¹

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu

¹⁰¹*Ibid, h.16*

diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah : 30) Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmurbumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Rasulullah SAW bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. (H.R. Bukhari). Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga

keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.¹⁰²

Teori ekonomi Islam dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan kata lain, adanya manusia berkhlak adalah hal mutlak dalam ekonomi.

¹⁰²*Ibid*, h.23.

Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah hanya tergantung pada teori dan sistemnya saja, melainkan pada pelaku bisnisnya. Oleh karena itu akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang menaungi ekonomi Islam.

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain. Sikap toleransi berlaku juga pada pihak yang memberi utang, apabila seorang yang berutang dalam keadaan sulit untung membayar utangnya hendaknya berlaku tasamuh dengan cara memberikan tangguhan atau memperpanjang jangka waktu penagihan sampai debitur berkelapangan. Maka berdasarkan sikap tasamuh ini kedua belah pihak akan terhindar dari kerugian.

Dalam ekonomi Islam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk penyaluran dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, apapun kondisi yang dihadapi tetap harus berusaha memenuhi komitmen yang telah dibuat.

Merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 di atas tentang memberikan tangguhan sampai debitur berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang debitur, dalam ekonomi Islam ada beberapa hal

yang harus dipelajari dari ayat tersebut, di ayat pertama mengajarkan agar berlaku lunak atau toleransi kepada orang yang berutang. Dan ayat kedua menunjukkan sasaran pembagian zakat, dan bukan semata-mata melunasi hutang debitur begitu saja, Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh.

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa etika utang-piutang dalam Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.
2. Kreditur boleh meminta jaminan dari debitur sebagai perlindungan.
3. Jika seorang debitur berada dalam keadaan susah dan tidak berada dalam posisi finansial yang memungkinkan untuk mengembalikan utangnya, maka kreditur hendaknya menunda penagihannya hingga posisi finansial debitur membaik dan ia mampu melunasi utangnya.
4. Seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya.

Fatwa DSN 48/DSN-MUI/II/2005: Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰³

Mengacu pada fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 maka penerapan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* terhadap nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa menjadi acuan utama dalam menentukan penjadwalan kembali. Jumlah cicilan nasabah sebelum dan sesudah penjadwalan kembali adalah sama. Jumlah cicilan yang lebih banyak dan/atau dlebihkan baik sengaja atau tidak sengaja sama dengan riba. Ketika melakukan penjadwalan kembali, pembebanan biaya adalah biaya administrasi dll, yang terkait dengan penjadwalan ulang kepada nasabahnya, dan biaya tersebut termasuk biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, dengan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan penjadwalan kembali, dengan tujuan dan manfaat saling menguntungkan. Bank dapat menarik kembali pembiayaan yang dikeluarkan sedangkan nasabah mampu mengangsur pembiayaan dengan lebih lama.

¹⁰³Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Berdasarkan analisis di atas penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat : 280 tentang memberikan tangguhan kepada debitur sampai berkelapangan, dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan *murabahah*.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah BPRS Bandar Lampung telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi di atas dengan berlandaskan kepercayaan kepada nasabah. Dalam transaksi pembiayaan modal kerja, kepercayaan merupakan unsur terpenting, yaitu kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka dengan dasar kepercayaan itu perlu dilanjutkan dengan adanya jaminan, dengan tujuan agar hubungan utang-piutang yang dilakukan kedua belah pihak terhindar dari kerugian. Namun dalam prakteknya BPRS Bandar Lampung berupaya keras agar nasabah yang memiliki tunggakan di bank dapat segera memenuhi kewajibannya dan menghindari penyitaan barang jaminan. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, kreditur boleh meminta jaminan kepada debitur sebagai perlindungan, dan seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya.

Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara sisa pokok

yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah, dan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan tidak ada penambahan biaya kecuali biaya rill atau biaya administrasi dalam prosesnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi yang berjudul “**Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah*.**”

Dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Bandar Lampung dilakukan melalui tahapan yang sangat panjang, mulai dari pemberian peringatan melalui *bycall* kepada nasabah bahwa pembiayaan sudah jatuh tempo, peringatan tertulis dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 apabila nasabah mengalami tunggakan dalam waktu 10 hari, SP 2 apabila tunggakan melampaui waktu 11-20 hari dan SP 3 apabila tunggakan mencapai 20 hari atau sampai sebulan. Apabila dengan pemberian SP 1, 2 dan 3 tidak menuai hasil, maka dilakukan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah.
 - a. BPRS Bandar Lampung dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan modal kerja yang memenuhi kriteria :

- 1) Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran,
 - 2) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik,
 - 3) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *rescheduling*.
- b. Penerapan prinsip *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung dinilai lebih efektif karena sekitar 50 % nasabah dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.
- c. Jika nasabah tidak ada itikad baik maka pihak BPRS Bandar Lampung dengan kesepakatan bersama dengan nasabah akan menjual jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan menjual jaminan milik nasabah. Jika penjualan jaminana melebihi nilai hutang maka BPRS mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari nilai hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah.
2. Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian tagguhan kepada nasabah, kaidah Fiqih tentang Muamalah, dan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.

B. Saran

1. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah di BPRS bandar Lampung telah dilakukan dengan baik, namun demikian analisa 5C terhadap calon debitur harus dilakukan lebih hati-hati lagi, bank harus lebih memahami prospek usaha nasabah kedepan dengan menjaga hubungan baik dengan debitur agar meminimalisir risiko kerugian.
2. Hendaknya nasabah pembiayaan modal kerja memiliki itikad baik dan tanggung jawab yang kuat terhadap pembiayaan yang diperoleh, agar status kolektibilitas selalu lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.
3. Kesesuaian implementasi *rescheduling* dengan fatwa DSN-MUI harus benar-benar dijalankan dengan baik, jangan sampai keluar dari konteks hukum yang telah dibuat, agar kepercayaan nasabah semakin meningkat dengan aktivitas perbankan yang benar-benar syariah sebagai prioritas.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Adrian Sutedi, 2008. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Arifin Arvian, Veithzal, 2010. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Aji,Rizal, Ahim. 2014. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Selemba Empat.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : RinekaCipta.

Dedy, Mulyana. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika

____Faturahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafindo.

Ifham, Ahmad Sholihin. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

IkatanBankir Indonesia, 2018. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

____Ikatan Bankir Indonesia, 2015. *Manajemen Risiko*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo 2010.

____2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : Rajawali Pers

Muhamad, 2014 *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mujahidin, Akhmah. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

Muttaqien Dadan, 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Safitria Insania Press.

Nazir, Moh, 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pabunda Tika, Moh. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Rianto Bambang, Rustam, 2013. *Manajemen resiko Perbankan Syariah di Indonesia* . Jakarta Salemba Empat.

Rivai, Veithzal, 2007. *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'I System*. Jakarta : Raja Grafindo.

Rivai, Vethzal dan Antoni, 2015. *Islamic Economi & Finance*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rodoni Ahmad dan Abdul Hamid, 2008. *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim).

Salim Petter, dan Yeni, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.

Shomad Abd, Trisadini, 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Suhrawadi, Lubis, Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sumitro, Warkom, 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suryabrata, Sumadi. 2015. *Metodologi penelitian*. Jakarta : rajawali Press.

Wangsanwidjaya, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Syeikh M. al-Albani *Mukhtasar Shahih Muslim*, h.869

Jurnal :

Prasetyana, Nur Eka. Dkk. 2014 “*Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah*”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 4.

Turmudi, Muhamad. 2016. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. I, No. 1.

Taufiq dan Muhammad, 2016. *Penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah pada perbankan syariah*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1.

Skripsi :

Laili Maulistina, 2017. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada BPRS Bandar Lampung*. Skripsi, program studi Perbankan Syariah. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.

Nika Anggun Pratiwi. 2016. “*Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar*”, Skripsi, program studi Ekonomi Islam, Lampung : UIN Raden Intan Lampung.

Reza Yudistira. 2011. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*”. Skripsi, Program studi Muamalah. Jakarta : UIN Syarih Hidayatullah.

Kitab :

Al-Qur'an Cordoba, 2016. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Cet. 5. Bandung : Cordoba.

Fatwa DSN :

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Nasabah yang Tidak Mau Membayar.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Web :

<http://www.banksyariahbandarlampung.ac.id>, diakses pada 19 April 2018

<Http://www.bi.go.id/> diakse pada 22 Mei 2018.

Bank Indonesia, *PBI Nomor 13/9/2011*, (07 Juni 2018).

